

Peran Komunikasi Politik Pemangku Kepentingan Pada Pelaksanaan Kebijakan Perberasan

M.S. Nasution^{a)}, A.V.S. Hubeis^{b)}, A. Saleh^{b)}

^{a)}Jl. Gn. Batu No.128 Kec. Ciomas-Bogor, telp. 0251-8351788, urjunasution@yahoo.com, ^{b)} Mayor Komunikasi Pembangunan, Gedung Departemen KPM IPB Wing 1 Level 5, Jalan Kamper Kampus IPB Darmaga, Telp. 0251-8425252, Fax. 0251-8627797

Abstrak

Rice in Indonesia has a strategic role especially in economic. Rice issues also playing a sensitive role on social and political security. Rice is also a prime food for the majority of Indonesian people; therefore need a good and right management from upper course up to lower course. The strong role of political communication become one of the way on the making of rice policy implementation especially by involving those interest functionary on rice. This research was designed as survey with descriptive correlation, respondent comprised of farmer organization, government, rice entrepreneur, and IV commission of house of representative. Quantitative analysis used by descriptive statistical and correlation analysis with rank Spearman correlation statistical test. The role of political communication of farmer organization are on the middle category, government on strong category, rice entrepreneur on middle category and IV commission of House of Representative on middle category. At the personal characteristic of farmer organization on formal education, experiences on farmer organization and IV commission of house of representative actually significant with the role of political communication on rice policy implementation. At the situational characteristic on communication access of government and IV commission of house of representative, political participation of all interest functionary are tangibly significant and only IV commission of house of representative political perception that tangible not significant with the role of political communication on rice policy implementation. At political communication behavior, the information dependency on mass media on government tangible significant. Meanwhile respons on public opinion for IV commission of house of representative is significant and political attitude all of interest functionary tangible significant with the role of political communication of rice policy implementation. Mass media has their role as one of the information source which is considerably objective and public opinion on the subject of rice policy implementation has also considerably become one of intake correction. The choices of Political attitude at the current time are valuable to bring out cooperation and re-actualize strong and powerful policy implementation in the future.

Keywords: political communication, interest functionary, rice policy

1. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Ketersediaan beras memerlukan penataan dan manajemen yang berbasis pada kemampuan sumberdaya masyarakat dalam negeri. Kebijakan perberasan dengan mekanisme impor telah memberi dampak dan konsekuensi politik yang tinggi bagi kemampuan dan kemandirian bangsa dalam pengadaan makanan pokok nasional. Kebijakan impor beras menjadi perdebatan di tengah-tengah masyarakat, karena hal ini tidak sesuai dengan komitmen pemerintah merealisasikan kebijakan revitalisasi pertanian. Hal ini juga bertentangan dengan realitas tingginya jumlah penduduk yang menggantungkan hidupnya pada sektor pertanian khususnya padi. Terjadinya kekurangan

beras dalam jumlah besar akan cepat mempengaruhi kondisi stabilitas sosial masyarakat. Pentingnya peranan beras terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara, mendorong kebijakan beras menjadi sorotan dan menjadi fokus perhatian publik. Pemerintah mengeluarkan pelaksanaan kebijakan perberasan, meliputi: penetapan harga pembelian pemerintah (HPP); mekanisme impor; subsidi benih dan pupuk; pengembangan teknologi; dan perbaikan infrastruktur pendukung (Deptan, 2004). Kebijakan politik yang dikeluarkan pemerintah tersebut untuk menjawab persoalan perberasan di dalam negeri. Sukses atau gagalnya kebijakan perberasan di Indonesia, sangat dipengaruhi oleh adanya informasi dan komunikasi yang diterima oleh para

*Peran Komunikasi Politik Pemangku Kepentingan
Pada Pelaksanaan Kebijakan Perberasan*

petani dan pemangku kepentingan lainnya. Berhasilnya Indonesia dalam swasembada beras di tahun 1984 juga merupakan salah satu peran komunikasi (Levis, 1996). Peranan komunikasi politik menjadi sangat penting dalam menyampaikan kebijakan yang menyangkut kepentingan publik sebab diperlukan pengetahuan yang luas terutama proses pendekatan dalam penyampaian suatu maksud agar dapat diterima masyarakat (Budiharsono, 2003).

Lasswell dalam Arifin (2003) membuat formula komunikasi politik *“who says what, to whom, with what channel and with what effect.”* Peran komunikasi politik pemangku kepentingan perberasan sangat menentukan dalam pelaksanaan kebijakan perberasan di mata publik. Peran komunikasi politik yang dilakukan pada akhirnya diharapkan melahirkan konsensus politik bersama, kesimpulan politik atau sering disebut sikap politik. Wilayah Indonesia masih memiliki potensi besar dalam pengembangan padi, di samping secara historis mampu berswasembada beras. Pelaksanaan implementasi instrumen kebijakan perberasan dengan baik dan berkelanjutan sesuai aturan, seperti penetapan HPP, ketepatan melakukan impor, penerapan subsidi benih dan pupuk, pengembangan teknologi dan perbaikan infrastruktur pendukung akan mampu mengatasi masalah kekurangan beras di dalam negeri dan bahkan mampu ekspor. Pada tahap idealnya seharusnya Indonesia mampu memenuhi kebutuhan beras sendiri dan mengekspor dalam jumlah besar, apabila masalah kebijakan di atas dapat dibenahi, termasuk mengikis budaya impor beras. organisasi tani, pemerintah, pengusaha beras, komisi IV DPR dan masyarakat pengkonsumsi beras tentu punya kepentingan suksesnya kebijakan tersebut.

Berbagai studi dan hasil penelitian menunjukkan bahwa peran komunikasi politik dipengaruhi karakteristik personal, karakteristik situasional dan perilaku komunikasi politik. Maka dari itu, karakteristik personal, karakteristik situasional dan perilaku komunikasi politik pemangku kepentingan perberasan menjadi peubah bebas dan peran komunikasi politik pemangku kepentingan perberasan pada pelaksanaan kebijakan perberasan menjadi peubah tidak bebas dalam penelitian ini. Untuk mengetahui hubungan antara kedua peubah tersebut, maka perlu diadakan suatu penelitian.

1.2 Perumusan Masalah

1. Seperti apa karakteristik personal, karakteristik situasional dan perilaku komunikasi politik pemangku kepentingan perberasan?
2. Apa saja peran komunikasi politik pemangku kepentingan pada pelaksanaan kebijakan perberasan?
3. Sejauh mana hubungan karakteristik personal, karakteristik situasional dan perilaku komunikasi politik dengan peran komunikasi politik pemangku kepentingan pada pelaksanaan kebijakan perberasan?

1.3 Tujuan Penelitian

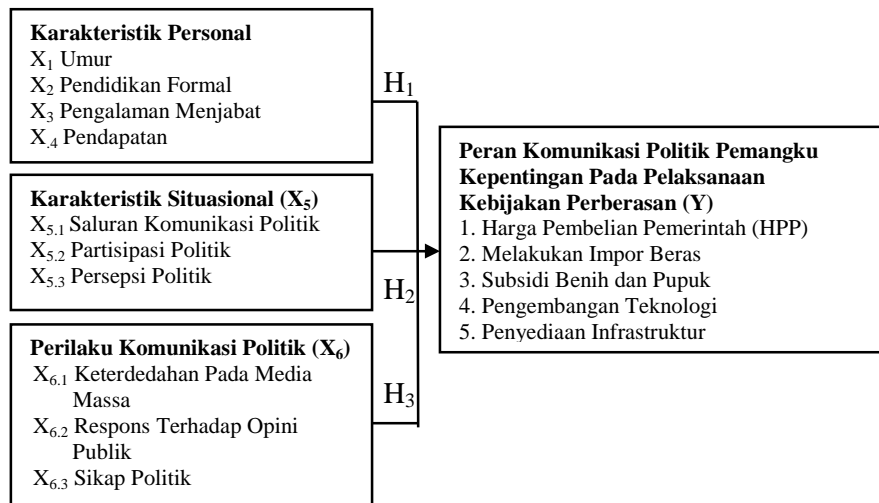
1. Mendeskripsikan karakteristik personal, karakteristik situasional dan perilaku komunikasi politik pemangku kepentingan perberasan.
2. Menjelaskan peran komunikasi politik pemangku kepentingan perberasan pada pelaksanaan kebijakan perberasan.
3. Menganalisis hubungan antara karakteristik personal, karakteristik situasional dan perilaku komunikasi politik dengan peran komunikasi

politik pemangku kepentingan pada pelaksanaan kebijakan perberasan.

2. Kerangka Pemikiran dan Hipotesis

Karakteristik personal pemangku kepentingan perberasan, karakteristik

personal, karakteristik situasional dan perilaku komunikasi politik sebagai peubah bebas. Sedangkan peran komunikasi politik pemangku kepentingan pada pelaksanaan kebijakan perberasan sebagai peubah tidak bebas.



Gambar1. Kerangka Pemikiran Peran Komunikasi Politik Pemangku Kepentingan pada Pelaksanaan Kebijakan Perberasan

Berdasarkan kerangka berpikir pada Gambar 1, dapat disusun hipotesis penelitian sebagai berikut:

- H₁: Terdapat hubungan nyata antara karakteristik personal dengan peran komunikasi politik pemangku kepentingan perberasan pada pelaksanaan kebijakan perberasan.
- H₂: Terdapat hubungan nyata antara karakteristik situasional dengan peran komunikasi politik pemangku kepentingan perberasan pada pelaksanaan kebijakan perberasan.
- H₃: Terdapat hubungan nyata antara perilaku komunikasi politik dengan peran komunikasi politik pemangku kepentingan perberasan pada pelaksanaan kebijakan perberasan.

3. Metode Penelitian

3.1 Desain, Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian didesain sebagai penelitian survei deskriptif korelasional dengan kuesioner sebagai alat pengumpulan data primer. Lokasi penelitian dilaksanakan di Jakarta, ditentukan secara *purposive*. Penelitian ini dilakukan bulan Mei sampai Desember 2007.

3.2 Populasi dan Sampel

Populasi penelitian adalah para pemangku kepentingan perberasan, pernah terlibat dalam perumusan kebijakan perberasan, berperan dalam mempengaruhi kebijakan perberasan dan memiliki fokus perhatian pada pelaksanaan kebijakan perberasan serta memiliki konsentrasi terhadap pelak-

*Peran Komunikasi Politik Pemangku Kepentingan
Pada Pelaksanaan Kebijakan Perberasan*

sanaan kebijakan perberasan. Berdasarkan kriteria hasil prasurvei tersebut, diputuskan bahwa penarikan sampel menggunakan teknik *purposif sampling* dan difokuskan pada unsur pemangku kepentingan perberasan yang utama (organisasi tani, pemerintah, pengusaha beras dan komisi IV DPR). Jumlah sampel penelitian sebanyak 60 responden, masing-masing 15 responden dari tiap unsur pemangku kepentingan.

3.3 Analisis Data

Pengolahan data menggunakan statistik deskriptif berupa presentase, rata-rata skor dan total rata-rata skor. Analisis hubungan antara peubah bebas dengan peubah tak bebas dilakukan dengan uji korelasi *rank* Spearman (Siegel, 1992), menggunakan program SPSS 14,0 For Windows (Sarwono, 2006).

4. Hasil dan Pembahasan

4.1 Karakteristik Personal

Usia responden dari keempat pemangku kepentingan perberasan adalah termuda 29 tahun dan yang tertua 62 tahun, dengan presentase kelompok umur usia muda 15 persen, yang terbesar terdapat pada kelompok umur dewasa/produktif 66,6 persen, sedangkan kelompok umur tua 18,4 persen. Berdasarkan indikator usia kerja Depnakertras yaitu 15-55 tahun merupakan umur yang masih produktif, berarti sebagian besar pemangku kepentingan perberasan termasuk kategori usia produktif dalam menjalankan fungsi dan kinerjanya dalam melakukan komunikasi politik.

Pendidikan formal responden sebagian besar 78 persen mengenyam sampai perguruan tinggi, 18 persen Diploma dan empat persen setingkat SLTA. Untuk responden pemerintah semuanya sarjana, bahkan untuk be-

berapa pejabat kalangan pemerintah sampai pada jenjang strata tiga bergelar Doktor. Artinya, tingkat pendidikan yang tinggi berkorelasi dengan tingkat partisipasi peran komunikasi politik.

Karakteristik pengalaman menjabat responden dalam penelitian ini dihitung berdasarkan satuan tahun yaitu, rendah (<3 tahun), sedang (3-4 tahun) dan tinggi (>4 tahun). Responden yang tingkat pengalaman menjabat kategori rendah kurang dari empat persen, sedang 66,7 persen dan tinggi 30,0 persen. Pengalaman menjabat adalah pengalaman responden selama masa menjabat pada posisi yang sekarang dijalani. Hal ini sesuai dengan aturan dan mekanisme dikelembagaan masing-masing.

Pendapatan responden tergolong tinggi semuanya berada di atas UMR yang berlaku di DKI Jakarta. Artinya, semua responden masuk dalam golongan masyarakat berpendapatan tinggi. Pendapatan pemangku kepentingan perberasan terendah sebesar Rp 4.500.000,- perbulan ada pada organisasi tani. Pendapatan tertinggi adalah Rp 170.000.000,00,- perbulan ada pada anggota komisi IV DPR. Beberapa responden memiliki beberapa sumber pendapatan umumnya tidak bersumber dari satu bidang profesi atau kerja. Pendapatan yang tinggi memiliki kesempatan lebih dalam memiliki dan memanfaatkan berbagai jenis media komunikasi yang ada.

4.2 Karakteristik Situasional

Responden organisasi tani kategori sedang dengan rata-rata skor 3,13, pemerintah kategori kuat dengan rata-rata skor 3,59, pengusaha beras kategori kuat dengan rata-rata skor 3,43 dan komisi IV DPR kategori sedang dengan rata-rata skor 3,13 memanfaatkan saluran komunikasi politik pada situasi politik

nasional sehubungan pelaksanaan kebijakan perberasan. Bagi organisasi tani kuat memanfaatkan saluran komunikasi politik apabila ada kebijakan yang dianggap merugikan seperti impor beras dalam jumlah besar atau kebijakan tersebut mendapat perhatian luas dari publik. Pemerintah kuat memanfaatkan saluran komunikasi politik disebabkan posisi pemerintah pada pelaksanaan kebijakan perberasan juga sebagai pusat informasi dan pengelola Dewan Ketahanan Pangan (DKP) sebagai wadah bersama, sehingga mudah mensosialisasikan kebijakan dan memanfaatkan media massa sebagai saluran komunikasi politik. Pengusaha beras kuat memanfaatkan saluran komunikasi politik disebabkan keinginan besar melakukan impor beras sehingga juga kuat menggunakan saluran komunikasi politik dengan melobi pemerintah. Bagi komisi IV DPR perhatian tinggi memanfaatkan saluran komunikasi politik terhadap instrumen kebijakan perberasan khususnya jika kebijakan yang diputuskan pemerintah mendapat perhatian tinggi juga dari publik.

Partisipasi politik adalah bentuk tingkat kepedulian partisipasi secara politik dan tingkat responsif secara politik pada pelaksanaan kebijakan perberasan. Responden organisasi tani kategori sedang dengan rata-rata skor 3,19, pemerintah kategori sedang dengan rata-rata skor 3,37, pengusaha beras kategori sedang dengan rata-rata skor 3,04 dan komisi IV DPR kategori kuat dengan rata-rata skor 3,41 tingkat partisipasi politik pada pelaksanaan kebijakan perberasan. Bagi organisasi tani partisipasi politiknya semakin meningkat apabila ada instrumen kebijakan yang dianggap ekstrim atau merugikan dan memiliki dampak terhadap petani. Bagi pemerintah situasi ini memperjelas bahwa partisipasi politiknya belum kuat, walaupun saat ini semakin banyak departemen yang

mengurusi beberapa instrumen kebijakan perberasan. Namun hal tersebut tidak berkontribusi besar meningkatkan partisipasi politik dalam membenahan beberapa implementasi kebijakan perberasan. Bagi komisi IV DPR partisipasi politiknya makin tinggi apabila sorotan publik juga tinggi melakukan penolakan atas instrumen kebijakan yang diputuskan pemerintah.

Responden organisasi tani dikategorikan sedang dengan rata-rata skor 3,25, pemerintah kategori kuat dengan rata-rata skor 3,42, pengusaha beras kategori sedang dengan rata-rata skor 3,36 dan komisi IV DPR kategori sedang dengan rata-rata skor 3,36 persepsi politiknya pada pelaksanaan kebijakan perberasan. Bagi pemerintah kebijakan yang ditempuh sekarang sudah sesuai, dengan pilihan kebijakan yang bisa dilakukan pada lima instrumen kebijakan perberasan yang ada. Persepsi politik di luar pemerintah dikategorikan sedang pada situasi politik nasional saat ini. Kecenderungan persepsinya sedang terhadap lima instrumen kebijakan perberasan yang ada berarti menjelaskan bahwa instrumen yang ada dinilai buruk sebagian atau mendukung beberapa instrumen kebijakan yang ada selama ini.

4.3 Perilaku Komunikasi Politik

Responden organisasi tani kategori sedang dengan rata-rata skor 3,34, pemerintah kategori sedang dengan rata-rata skor 3,16, pengusaha beras kategori sedang dengan rata-rata skor 3,35 dan komisi IV DPR kategori sedang dengan rata-rata skor 3,07 tingkat keterdedaahannya pada media massa. Hal ini menggambarkan bahwa frekuensi isi media massa dalam pemberitaan seputar kebijakan perberasan dikategorikan sedang dalam memberi informasi kepada responden. Artinya, media massa sendiri memiliki

*Peran Komunikasi Politik Pemangku Kepentingan
Pada Pelaksanaan Kebijakan Perberasan*

keterbatasan dalam pemberitaan yang terkait dengan kebijakan perberasan. Bagi kalangan pemerintah keterdedahan pada media massa kategori sedang mempengaruhi perilaku komunikasi politiknya. Bagi pengusaha beras informasi dan ketergantungannya terhadap media massa merupakan bentuk keingintahuan pada perkembangan beberapa informasi di samping instrumen kebijakan perberasan seperti perkembangan harga komoditas. Sehingga berdasarkan rata-rata skor tersebut keterdedahan pada media massa dikategorikan sedang mempengaruhi perilaku komunikasi politiknya. Komisi IV DPR dikategorikan sedang menggunakan media massa sebagai sumber informasi pelaksanaan kebijakan perberasan. Kondisi ini terjadi karena bagi Komisi IV DPR sendiri sudah sering mendapatkan informasi dari pemerintah, ataupun organisasi tani pada waktu rapat kerja dan rapat dengar pendapat sehingga keterdedahan pada media massa dikategorikan sedang yang terkait dengan pelaksanaan kebijakan perberasan.

Respons terhadap opini publik responden masuk pada kategori kuat dengan rata-rata skor 3,48 untuk organisasi tani, pemerintah kategori sedang dengan rata-rata skor 3,24, pengusaha beras kategori sedang dengan rata-rata skor 3,26 dan Komisi IV DPR kategori kuat dengan rata-rata skor 3,42. Bagi organisasi tani respons terhadap opini publik masuk kategori kuat mempengaruhi peran komunikasi politiknya pada pelaksanaan kebijakan perberasan. Artinya, semakin banyak orang yang memberikan kontribusi pendapat, opini, tulisan, kritikan dan masukan seputar implementasi kebijakan perberasan kuat mempengaruhi perilaku tindakan komunikasi politik responden pada pelaksanaan kebijakan perberasan. Pemerintah memiliki

tingkat respons dengan kategori sedang terhadap opini publik dan dikategorikan sedang mempengaruhi peran komunikasi politiknya. Hal ini juga mengindikasikan tidak semua opini publik pemerintah setuju, kondisi ini ditunjukkan dengan tingkat penilaian rata-rata kategori sedang. Pengusaha beras memiliki tingkat penilaian sedang, responden pengusaha beras berpendapat yang terpenting segera dilakukan adalah melakukan modernisasi sektor pertanian khususnya tanaman padi. Kalangan Komisi IV DPR merupakan wakil rakyat sebagai penampung aspirasi publik kondisi ini ditunjukkan dengan tingkat penilaian kuat terhadap opini publik yang ada selama ini. Hal ini berarti Komisi IV sejalan dengan beberapa opini publik yang berkembang bahwa ada beberapa instrumen kebijakan yang musti dibenahi segera.

Sikap politik responden masuk pada kategori sedang dengan nilai rata-rata 3,14 untuk organisasi tani, pemerintah kategori kuat dengan rata-rata skor 3,71, pengusaha beras kategori sedang dengan rata-rata skor 2,87 dan Komisi IV DPR kategori sedang dengan rata-rata skor 3,29. Bagi kalangan organisasi tani hal ini berarti bahwa dari lima instrumen yang ada selama ini, sebagian kebijakan mendapat dukungan dan sebagian cenderung menolak. Pemerintah memiliki sikap politik kuat, dimana kebijakan perberasan yang berlaku saat ini mendapat sikap politik mendukung atau setuju. Sikap mendukung akan mengarahkan perilaku politiknya bahwa pilihan lima instrumen kebijakan yang sekarang sudah sesuai, ada indikasi akan mempertahankan perilaku politiknya untuk mendukung kebijakan yang berlaku saat ini. Pengusaha beras memiliki tingkat dukungan yang sedang atau cenderung memiliki sikap politik menolak beberapa pelaksanaan kebijakan yang berlaku saat ini. Pengusaha

memiliki sikap politik menolak disebabkan kecenderungan kebijakan perberasan yang sekarang mengarah pada tidak adanya izin impor beras dalam jumlah besar. Komisi IV memiliki sikap politik kategori sedang pada pelaksanaan kebijakan perberasan yang berlaku saat ini. Hal ini menjelaskan bahwa pelaksanaan kebijakan perberasan yang berjalan saat ini mengindikasikan penolakan pada beberapa kebijakan. Dimana beberapa kebijakan belum optimal dijalankan oleh pemerintah pada pelaksanaan kebijakan perberasan, komisi IV memberi penilaian buruk yang melahirkan sikap penolakan pada beberapa kebijakan yang selama ini berjalan.

4.4 Peran Komunikasi Politik

Pemangku Kepentingan Perberasan

Peran komunikasi politik organisasi tani memiliki rataan skor untuk penerapan HPP 3,53, melakukan impor 2,58, subsidi benih dan pupuk 3,40, pengembangan teknologi 3,49, perbaikan infrastruktur 3,46. Berarti organisasi tani cukup kuat peran komunikasi politiknya mempengaruhi kebijakan perberasan untuk tetap mempertahankan adanya penerapan instrumen kebijakan HPP. Lemah peran komunikasi politiknya untuk memberi dukungan melakukan impor beras, hal ini menunjukkan menolak kebijakan impor beras sebagai instrumen kebijakan yang terus dipertahankan. Selanjutnya peran komunikasi politik yang dilakukan makin kuat untuk mendukung kebijakan pada realisasi pengembangan teknologi dan perbaikan infrastruktur.

Peran komunikasi pemerintah memiliki rataan skor untuk penerapan HPP 3,27, melakukan impor 3,28, subsidi benih dan pupuk 3,39, pengembangan teknologi 4,15, perbaikan infrastruktur 4,20. Kalangan pemerintah

memiliki kategori sedang dalam mempengaruhi penentuan melakukan impor beras artinya pemerintah berada pada posisi yang mendukung impor beras ketika di dalam negeri sudah berada pada tahap tidak mencukupi produksi dan stok beras di dalam negeri menghawatirkan dapat mengganggu stabilitas politik. Selanjutnya dikategorikan kuat dalam mendukung peran komunikasi yang dilakukan dalam perbaikan infrastruktur pada kebijakan perberasan yang ada saat ini.

Peran komunikasi pengusaha beras memiliki rataan skor untuk penerapan HPP 3,04, melakukan impor 3,70, subsidi benih dan pupuk 3,28, pengembangan teknologi 3,39, perbaikan infrastruktur 3,55. Pengusaha beras memiliki tingkat paling tinggi nilai rataannya yang mendorong adanya impor beras. Artinya, tinggi peran komunikasi politik yang dilakukan dan cenderung untuk tetap mempengaruhi instrumen kebijakan melakukan impor beras pada pelaksanaan kebijakan perberasan.

Peran komunikasi komisi IV DPR memiliki rataan skor untuk penerapan HPP 4,11, melakukan impor 2,59, subsidi benih dan pupuk 3,17, pengembangan teknologi 3,19, perbaikan infrastruktur 3,31. Peran komunikasi politik yang dilakukan komisi IV cukup kuat mempengaruhi mempertahankan penerapan instrumen kebijakan HPP untuk tetap dipertahankan pada pelaksanaan kebijakan perberasan. Peran komunikasi politik komisi IV DPR ditunjukkan dengan mempengaruhi pemerintah melalui rapat kerja dan rapat dengar pendapat dengan mitra kerjanya dipemerintahan setiap dimulainya musim panen. Komisi IV tidak memiliki keinginan untuk melakukan impor beras sehingga peran komunikasi politik yang dilakukan lemah untuk memberi persetujuan untuk melakukan impor beras.

*Peran Komunikasi Politik Pemangku Kepentingan
Pada Pelaksanaan Kebijakan Perberasan*

*4.5 Hubungan Karakteristik Personal
dengan Peran Komunikasi Politik
Pemangku Kepentingan pada
Pelaksanaan Kebijakan Perberasan*

Hasil uji statistik *rank* Spearman karakteristik personal menunjukkan bahwa pendidikan formal pemerintah, pengalaman menjabat responden organisasi tani dan komisi IV DPR berhubungan nyata dengan peran komunikasi politik pada pelaksanaan kebijakan perberasan.

Responden pemerintah sebagian besar sudah menempuh pendidikan sampai perguruan tinggi dan sebagian besar bergelar Doktor. Jadi, semakin tinggi pendidikan maka tingkat penguasaan atas kebijakan perberasan makin tinggi dan hal ini berhubungan nyata dengan peran komunikasi politik yang dilakukan oleh aparat pemerintah.

Pengalaman lama menjabat organisasi tani dan komisi IV DPR berhubungan nyata dengan peran komunikasi politik dalam pelaksanaan kebijakan perberasan. Hal ini sejalan dengan penelitian Jauhari (2004) mengemukakan anggota legislatif 56 persen menjadi anggota legislatif lebih dari satu periode, sedangkan yang baru pertama menjadi anggota dewan 44 persen. Hasil analisisnya menunjukkan bahwa semakin lama periode menjadi anggota dewan semakin baik perilaku komunikasi politik dalam mengakomodir dan menyalurkan aspirasi pada pembahasan legislasi UU. Hal ini disebabkan karena aksesibilitas responden terhadap lingkungan internal dan eksternal lembaga legislatif lebih banyak dibanding dengan yang baru pertama menjadi anggota dewan. Bagi organisasi tani kebijakan perberasan timbul masalah hampir setiap tahun atau musim sehingga persoalan kebijakan perberasan terus menjadi perhatian dan

fokus adanya perbaikan melalui peran komunikasi politik. Jadi, semakin tinggi pengalaman menjabat organisasi tani dan komisi IV DPR berhubungan nyata dengan peran komunikasi politik yang dilakukan pada pelaksanaan kebijakan perberasan.

*4.6 Hubungan Karakteristik Situasional
dengan Peran Komunikasi Politik
Pemangku Kepentingan pada
Pelaksanaan Kebijakan Perberasan*

Berdasarkan uji statistik *rank* Spearman pada karakteristik situasional, untuk saluran komunikasi politik menunjukkan responden pemerintah dan komisi IV DPR terbukti memiliki hubungan sangat nyata dengan peran komunikasi politik yang dilakukan pada pelaksanaan kebijakan perberasan. Hasil uji statistik *rank* Spearman dapat dilihat pada Tabel 1.

Pemerintah dan komisi IV DPR menunjukkan bahwa semakin tinggi memanfaatkan saluran komunikasi politik pada situasi politik nasional saat ini, maka semakin tinggi peran komunikasi politik yang dapat dilakukan pada pelaksanaan kebijakan perberasan. Hal ini menunjukkan bahwa saluran komunikasi politik yang tersedia selama ini belum optimal dalam mendukung peran komunikasi politik organisasi tani dan pengusaha beras. Sehingga peran komunikasi politik dengan saluran yang ada belum banyak bermanfaat dalam menyalurkan aspirasi organisasi tani dan pengusaha beras. Situasi ini bisa dimungkinkan karena media massa sendiri sebagai salah satu saluran komunikasi politik yang utama tidak memiliki tingkat frekuensi yang tinggi dalam pemberitaan pelaksanaan kebijakan perberasan sehubungan dengan aspirasi keinginan organisasi tani dan pengusaha beras. Peran media massa dalam meliput dan pemberitaan

perkembangan pelaksanaan kebijakan perberasan umumnya terbatas pada instrumen yang mendapat perhatian dari publik seperti impor beras dan hal tersebut lebih banyak bersumber dari kalangan pemerintah atau legislatif. Organisasi tani sendiri memanfaatkan saluran komunikasi politik tinggi dengan menyalurkan aspirasi politiknya pada pelaksanaan kebijakan perberasan adalah ketika kebijakan tersebut dianggap sangat merugikan seperti adanya impor beras dalam jumlah besar. Kondisi ini menunjukkan bahwa sepanjang kebijakan tersebut berlaku normal dan tidak ada impor beras dalam jumlah besar organisasi tani juga tidak memanfaatkan saluran komunikasi politik yang tinggi. Beberapa kasus organisasi tani memanfaatkan saluran komunikasi politik kuat dan tindakan politik seperti demonstrasi adalah ketika terjadi impor dalam jumlah besar.

Partisipasi politik responden memiliki hubungan sangat nyata dengan peran komunikasi politik yang dilakukan pada pelaksanaan kebijakan perberasan. Artinya, semua pemangku kepentingan memiliki pandangan yang sama bahwa dalam pelaksanaan instrumen kebijakan yang selama ini berlangsung bentuk partisipasi politik yang dilakukan memiliki hubungan sangat nyata dengan tingkat frekuensi peran komunikasi politik yang diaktualisasikan guna perbaikan beberapa implementasi kebijakan yang selama ini ada. Kondisi ini juga memperjelas semakin kuat partisipasi politik yang dilakukan memiliki hubungan pada tingginya peran komunikasi politik yang dilakukan sehingga dengan kewenangan dan fungsi yang ada pada pemangku kepentingan berkolerasi positif terhadap perbaikan implementasi pada pelaksanaan kebijakan.

Bagi organisasi tani semakin tinggi persepsi politiknya menilai kelemahan implementasi kebijakan, maka semakin

tinggi juga peran komunikasi politik yang dilakukan pada pelaksanaan kebijakan perberasan guna mendukung perbaikan beberapa implementasi instrumen kebijakan yang ada. Persepsi politik komisi IV DPR tidak terbukti berhubungan nyata dengan peran komunikasi politik yang dilakukan pada pelaksanaan kebijakan perberasan. Hal ini juga memperkuat sinyalemen bahwa persepsi politik tidak selamanya akan diikuti dengan tindakan bentuk perilaku komunikasi politik yang mengarah seperti dalam melakukan komunikasi politik dan berkontribusi adanya kebijakan yang berpihak pada konstituen komisi IV DPR yaitu petani padi. Persepsi akan cepat berubah sesuai dengan pandangan dan analisa terhadap berjalannya suatu kebijakan dalam waktu periode tertentu. Umumnya persepsi politik anggota komisi IV DPR dari kalangan partai pendukung pemerintah cenderung mendukung kebijakan pelaksanaan perberasan yang saat ini berlaku. Sebaliknya anggota komisi IV DPR yang berada di luar pemerintahan memiliki persepsi politik menolak bentuk implementasi kebijakan yang berlaku saat ini. Selanjutnya tindakan politik kalangan legislatif tinggi pada persoalan perberasan umumnya setelah ada desakan dari publik.

4.7 Hubungan Perilaku Komunikasi Politik Pemangku Kepentingan dengan Peran Komunikasi Politik pada Pelaksanaan Kebijakan Perberasan

Berdasarkan uji statistik *rank Spearman* pada perilaku komunikasi politik keterdedahan pada media massa menunjukkan hanya responden pemerintah yang memiliki hubungan sangat nyata dengan peran komunikasi politik yang dilakukan pada pelaksanaan kebijakan perberasan.

*Peran Komunikasi Politik Pemangku Kepentingan
Pada Pelaksanaan Kebijakan Perberasan*

Semakin sering adanya pemberitaan media massa seputar kebijakan perberasan maka semakin tinggi peran komunikasi politik yang dilakukan khususnya responden pemerintah. Kondisi ini juga menjelaskan bahwa kalangan pemerintah memiliki ketergantungan atas informasi pemberitaan seputar pelaksanaan kebijakan perberasan. Hal ini bisa terjadi karena media massa merupakan salah satu alat media politik yang memiliki pengaruh atas bergulirnya berbagai kebijakan yang diputuskan pemerintah sehingga dengan sendirinya ada ketergantungan pada informasi media massa bagi kalangan pemerintah.

Keterdedahan pada media massa organisasi tani pada perilaku komunikasi politik terbukti berhubungan nyata dengan peran komunikasi politik organisasi tani pada pelaksanaan kebijakan perberasan. Artinya semakin sering pemberitaan seputar kebijakan perberasan khususnya yang sifatnya merugikan petani, maka peran komunikasi politik yang dilakukan organisasi tani juga makin sering/tinggi. Beberapa hasil penelitian menjelaskan bahwa media massa memiliki pengaruh lebih dominan dalam tingkat kognitif (pengetahuan) saja, tetapi berkurang pada sikap dan tindakan (Arifin, 2003). Sehingga sangat tergantung pada situasi dan kondisi khalayak, di samping daya tarik isi dan kredibilitas komunikator.

Makin tinggi respons terhadap opini publik pada perilaku komunikasi politik berhubungan nyata dengan makin tingginya perilaku komunikasi politik yang dilakukan responden komisi IV DPR ke pemerintah melalui peran komunikasi politik. Respons terhadap opini publik pemerintah tidak memiliki hubungan nyata dan malah berhubungan negatif sangat nyata. Artinya kalangan pemerintah tidak terlalu merespons apa yang menjadi polemik

dalam publik sehingga hubungannya negatif, sehingga tanpa merespons opini yang terus bergulir dipublik peran komunikasi politiknya tetap tinggi pada pelaksanaan kebijakan perberasan. Jadi opini publik juga bisa menjadi faktor menentukan pada perilaku komunikasi politik karena terkait dalam menyerap informasi sekaligus bisa merubah perilaku dan tindakan politik yang dilakukan.

Berdasarkan analisis uji statistik *rank* Spearman menunjukkan sikap politik semua responden terbukti berhubungan sangat nyata dengan peran komunikasi politik pada pelaksanaan kebijakan perberasan. Artinya pilihan sikap politik responden semakin tinggi maka akan diikuti dengan peran tindakan komunikasi politik yang tinggi dan berhubungan langsung dalam perilaku komunikasi politik merespons seputar perkembangan perberasan yang selama ini berjalan. Sikap politik mempertegas posisi masing-masing lembaga terhadap suatu hal yang diputuskan melalui mekanisme politik atau pengambil kebijakan. Jadi, bertindak melakukan tindakan politik sama dengan melakukan komunikasi politik (Arifin, 2003).

Komunikasi politik juga berperan dalam mekanisme adanya saling memberi masukan dan keputusan menerima, netral/abstain serta menolak jika hal tersebut bertentangan satu sama lain. Sehingga pada keputusan akhir melahirkan sikap politik seperti menerima, abstain dan menolak. Sikap politik yang dipilih akan berpengaruh pada tingkat capaian perbaikan dan konsistensi implementasi kebijakan perberasan. Sikap politik adalah orientasi nilai, simbol, keyakinan dan sikap yang mempengaruhi perilaku komunikasi politik seseorang atau kelompok (Malik, 1999).

5. Simpulan dan Saran

5.1 Simpulan

1. Karakteristik personal pemangku kepentingan perberasan umumnya berumur dewasa dan tergolong produktif, berpendidikan tinggi, pengalaman menjabat cukup lama dan berpendapatan menengah. Terdapat perbedaan respons politik pada karakteristik situasional antar masing-masing pemangku kepentingan perberasan, baik pada aspek saluran komunikasi politik, partisipasi politik dan persepsi politik. Untuk aspek pemanfaatan saluran komunikasi politik pada organisasi tani dan DPR terlihat baik, tingkat partisipasi politik hanya DPR yang masuk kategori baik, sedangkan persepsi politik yang baik hanya di kalangan pemerintah. Respons politik pada perilaku komunikasi politik pada keempat pemangku kepentingan perberasan tergolong kategori sedang.
2. Peran komunikasi politik pemangku kepentingan khususnya pemerintah masih lebih dominan dan tergolong kategori kuat dibandingkan organisasi tani, pengusaha beras dan komisi IV DPR pada pelaksanaan kebijakan perberasan.
3. Karakteristik personal pendidikan formal pemangku kepentingan pemerintah, pengalaman menjabat dan tingkat pendapatan pemangku kepentingan organisasi tani dan komisi IV DPR berhubungan nyata dengan peran komunikasi politik yang dilakukan pada pelaksanaan kebijakan perberasan. Karakteristik situasional saluran komunikasi politik pemangku kepentingan pemerintah dan komisi IV DPR, partisipasi politik semua pemangku kepentingan berhubungan sangat nyata, dan hanya persepsi politik

pemangku kepentingan komisi IV DPR yang tidak berhubungan nyata dengan peran komunikasi politik pada pelaksanaan kebijakan perberasan. Perilaku komunikasi politik untuk keterdedahan pada media massa pemangku kepentingan pemerintah memiliki hubungan sangat nyata, pemangku kepentingan organisasi tani, pengusaha beras dan komisi IV DPR berhubungan nyata dengan peran komunikasi politik pada pelaksanaan kebijakan perberasan. Respons terhadap opini publik pemangku kepentingan komisi IV DPR, pemerintah berhubungan sangat nyata, pemangku kepentingan organisasi tani berhubungan nyata dengan peran komunikasi politik pada pelaksanaan kebijakan perberasan. Sikap politik semua pemangku kepentingan berhubungan sangat nyata dengan peran komunikasi politik pada pelaksanaan kebijakan perberasan.

5.2 Saran

1. Faktor usia, pendidikan dan pengalaman diperlukan dalam memperkuat peran komunikasi politik. Para pemangku kepentingan perberasan perlu meningkatkan partisipasi politiknya dengan memanfaatkan saluran komunikasi politik yang tersedia sehingga persepsi politik yang buruk atas pelaksanaan kebijakan perberasan dapat dikomunikasikan dengan baik.
2. Untuk pemangku kepentingan perberasan organisasi tani, pengusaha beras dan komisi IV DPR perlu meningkatkan peran komunikasi politik guna mengimbangi dominasi kalangan pemerintah.
3. Sikap politik yang dimiliki masing-masing pemangku kepentingan perberasan perlu diakomodir dengan

*Peran Komunikasi Politik Pemangku Kepentingan
Pada Pelaksanaan Kebijakan Perberasan*

membangun konsensus politik bersama guna mewujudkan implementasi kebijakan yang baik dan kuat di masa depan, serta mampu membangun manajemen perberasan yang kuat di dalam negeri.

Daftar Pustaka

- Arifin, A. 2003. *Komunikasi Politik, Paradigma-Teori-Aplikasi-Strategi Komunikasi Politik Indonesia*. Balai Pustaka, Jakarta.
- Budiharsono, S.S. 2003. *Politik Komunikasi*. Grasindo, Jakarta.
- Deptan. 2004. "Revitalisasi Pertanian, Perkebunan Kehutanan dan Kelautan." Badan Ketahanan Pangan. Departemen Pertanian RI, Jakarta.
- Jauhari, A. 2004. "Peranan Komunikasi Politik dalam Proses Legislasi, Kasus Pada Pembahasan UU No. 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman di Komisi-III DPR RI". Tesis. SPs IPB, Bogor.
- Malik, J.D. 1999. *Pemilihan Langsung Presiden; Perspektif Budaya dan Komunikasi Politik*. Jurnal Ikatan Sarjana Komunikasi. Remaja Rosda Karya, Bandung.
- Levis, L.R. 1996. *Komunikasi Penyuluhan Pedesaan*. Citra Aditya Bakti, Bandung
- Sarwono, J. 2006. *Panduan Cepat dan Mudah SPSS 14,0*. Andi Offset, Yogyakarta.
- Siegel, S. 1992. *Statistik Nonparametrik Untuk Ilmu-Ilmu Sosial*. Gramedia, Jakarta.